

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.(Ali, 2015)

Penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki, penelitian yuridis empiris memiliki pengertian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum didalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian.(Ali, 2015)

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Batam atas proyek pelebaran jalan di atas ruas jalan yang masuk dalam hak pengelolaan BP Batam beserta status hukum terhadap ruas jalan tersebut setelah proyek pelebaran jalan ini telah selesai. Untuk itu, metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan penulis dalam penelitian.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian mengumpulkan data yang dibagi menjadi dua macam, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan pengamatan di tempat-tempat yang berhubungan dengan masalah penulis. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari bahan-bahan pustaka. (Ali, 2015)

3.2.1. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian hukum empiris penulis menerapkan jenis data-data yang akan di ambil oleh penulis untuk dikelola nantinya menjadi dua

bagian yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Data Primer merupakan data-data yang didapatkan langsung melalui wawancara dengan narasumber, pengamatan dilokasi ataupun laporan yang didapat dalam data tidak resmi yang akan diteliti oleh penulis.(Ali, 2015)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dapat memberikan pengertian terhadap data primer yang didapatkan, misalnya Bahan pustaka berupa buku dan kajian-kajian ilmiah mengenai hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.(Ali, 2015)

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menerapkan beberapa alat pengumpulan data yang akan di urai sebagai berikut:

- 1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau teks yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan di teliti oleh penulis yang nanti nya dapat diolah oleh peneliti untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada orang atau pihak yang bersangkutan langsung dengan pokok permasalahan sehingga penulis dapat menemukan jawaban-jawaban terkait hal yang akan di teliti untuk diolah menjadi data.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan juga agar penulis dapat lebih memfokuskan permasalahan dari penulis lebih rinci, dalam hal itu penulis pun menetapkan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Batam di khususnya di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dan BP Batam.

3.3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data adalah sesuai dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode penelitian empiris yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan kemudian diolah data-data tersebut kemudian disajikan dan juga dicoba untuk dibandingkan dengan pendapat para ahli,

Undang-Undang, dan teori-teori hukum yang dipilih oleh penulis untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian.

3.4. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi, juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain, penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah baik yang bersifat kajian teks maupun aplikasi *field research*.

Adapun karya ilmiah terdahulu yang diambil oleh penulis dengan menganggap memiliki kesamaan dalam judul skripsi yang penulis bahas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muhammad Zaenuddin (ISSN 2548-9909)

Muhammad Zaenuddin jurusan manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam dalam penelitiannya yang berjudul “Dualisme kelembagaan Antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam”. Dalam penelitian ini menggunakan metode *explanatory* yaitu dengan mengumpulkan data kuantitatif dahulu dan dilanjutkan data kualitatif untuk diolah yang membawa hasil bahwasanya benar adanya dualisme di pemerintahan kota batam ini dikaitkan dengan permasalahan bagaimana naik turun nya perekonomian dalam hal investasi. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Muhammad Zaenuddin lebih memfokuskan dalam

perekonomian di kota batam yang berhubungan dengan ke dualisme pemerintahan di Kota Batam sementara penulis lebih menitik berat mengenai kewenangan proyek pelebaran jalan dalam ke dualism di pemerintahan Kota Batam.

2. Muhammad Sapta Murti (ISSN 2089-9009)

Muhammad Sapta Murti Fakulta Hukum Universitas Padjajaran dalam penelitiannya yang berjudul “urgensi Otonomi Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015”. Dalam penelitian ini penyusun menerapkan teknik metode penelitian normatif dengan memperoleh hasil bahwa ke dualisme di Kota Batam ini kerap terjadi ke tumpa tindihan kewenangan antara dua lembaga tersebut dikaitkan juga dengan pelaksanaanya masyarakat ekonomi Asean 2015 yang diharapkan pemerintah pusat dapat memperhatikan masalah tersebut. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat adanya perbedaan, Muhammad Sapta Murti bertitik fokus terhadap ketumpa tindihan dalam dualisme di Kota Batam sementara penulis menitik fokuskan terhadap kewenangan salah satu lembaga yaitu Pemerintah Kota Batam terhadap aset lembaga yang satu nya yaitu BP Batam.

3. Muhammad Zaenuddin (ISSN 2540-7589)

Muhammad Zaenuddin manajemen bisnis dari Universitas Politeknik Batam dalam penelitiannya yang berjudul “Identifikasi Permasalahn Pasca Diterapkan Otonomi Daerah Di Kota Batam dan Alternatif Solusi

Kebijakan Mendatang” dalam penelitian ini penyusun menetapkan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan memperoleh hasil bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kota Batam dalam permasalahan ekonomi dalam menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan di Kota Batam adalah adanya dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam serta ketidakpastian hukum dikarenakan keduanya memiliki kewenangan yang sama sehingga adanya ketumpang tindihan. Dalam penelitian ini perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaenuddin terdapat pada titik fokus permasalahan yang walaupun sama sama membahas mengenai ketumpang tindih dari kedua lembaga yakni Pemerintah Kota Batam dan BP Batam namun penulis mempermasalahkan mengenai kewenangan pada pembangunan infrastruktur namun yang dilakukan oleh Muhamad Zaenudin ada pada ketidakpastian arah kebijakan investasi ekonomi .

4. Mifta Farid (ISSN 2355-4673)

Mifta Farid fakultas Hukum Universitas Jember dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi daerah “ dalam penelitiannya menerapkan metode yuridis empiris penelitian yang mendapatkan hasil dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai kewenangannya masih jauh dari ketentuan UU Penda di penelitian ini peneliti menitik fokuskan perhatian pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah apakah sudah sepenuhnya berbeda dengan penulis

yang melakukan penelitian menitik beratkan pada kewenangan pemerintah daerah pada suatu proyek.

5. Julianto Jover Jotam Kalalo (ISSN 2354-7693)

Julianto Jover Jotam Kalalo fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaksanaan Pelepasan Tanah Adat Di Kabupaten Merauke” penelitian yang menerapkan metode normatif dalam penelitian ini Julianto melakukan pembahasan mengenai bagaimana kewenangan suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri nya dalam hal tanah ulayat, walaupun memiliki kesamaan dalam penelitian yaitu julianto yang meneliti mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur daerah nya masing-masing namun dapat dilihat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Julianto mengfokuskan pada bagian tanah hak ulayat berbanding dengan yang dilakukan dengan penulis, penulis meneliti tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur.

6. Ilyas (ISSN 2527-8428)

Ilyas fakultas Ilmu Hukum dalam penelitian yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah” dalam penelitian yang menggunakan hukum normatif penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam membantu proses penyelesaian sengketa tanah di daerah nya berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu penulis mengkaji tentang

kewenangan suatu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang walaupun kedua nya di atur di Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

7. Fatkhul Muin (ISSN 1978-5186)

Fatkhul Muin seorang mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dalam penelitiannya yang berjudul “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah” dalam penelitiannya yang menerapkan metode normatif. Dengan hasil bahwasaya pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan daerah nya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Setelah mengetahui isi dari jurnal tersebut dapat disimpulkan mengenai perbedaan antara jurnal milik Fatkhul Muin dengan penulis yaitu penulis meneliti kewenangan pemerintah yang terjadi ketumpa tindihan dikarenakan adanya dua lembaga sedangkan Fatkhul Muin hanya meneliti mengenai kewenangan suatu pemerintah daerah yang dapat mengurus urusan nya sendiri tanpa adanya ketumpa tindihan kewenangan.